

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan dunia perkreditan di Indonesia yang tumbuh amat cepat menimbulkan persaingan yang makin tajam pada bidang bisnis tersebut. Dalam kondisi persaingan semacam itu pegadaian sebagai salah satu badan yang bergerak di bidang perkreditan tidak lepas dari pengaruhnya.

Pegadaian merupakan salah satu badan di Indonesia yang secara resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Dengan motto "Mengatasi Masalah tanpa Masalah", hal ini membuat badan usaha pegadaian makin diminati oleh masyarakat utamanya ketika mereka sangat terdesak untuk segera mendapatkan dana pinjaman, melalui proses yang lebih sederhana dan dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan kredit perbankan. Objek yang digadaikan biasanya terdiri dari emas dan perhiasan, barang elektronik, kendaraan bermotor, maupun barang berharga lainnya.

Masyarakat dapat meminjam uang melalui lembaga tersebut yakni pegadaian dengan cara menjaminkan barang-barang berharga. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Selain itu prosedur untuk memperoleh kredit gadai sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang

bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak begitu lama. Begitu pula untuk melunasi pinjaman, cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti. Lembaga pegadaian menjadi alternatif pilihan pemenuhan kebutuhan masyarakat karena prosedur, proses, dan caranya yang begitu mudah. Dan meminjam uang ke pegadaian biaya yang dibebankan juga lebih ringan apabila dibandingkan dengan lembaga lain.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barang sebagai jaminan terhadap utangnya tersebut. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan atau orang yang berutang tetapi dikuasai oleh penerima gadai atau yang berpiutang.

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, disebutkan bahwa :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan barang kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil kekuasaan kepada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan”

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Nasabah atau peminjam ada kalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati. Setelah melalui peringatan terlebih dahulu, namun tidak melakukan perpanjangan, maka lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan yang dibawah kekuasaannya.

Lelang itu sendiri merupakan suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai pada akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2013 Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan / atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

Dalam melakukan penjualan lelang setiap aktivitas yang telah dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) akan diproses sesuai dengan bukti transaksi serta data-data yang mendukung dan nantinya akan dicatat oleh pihak Pegadaian baik itu dalam menginput data penjualan lelang barang jaminan secara manual maupun komputer. Apabila langkah-langkahnya dilaksanakan dengan baik dan benar maka serangkaian dari proses penginputan data terkait penjualan lelang barang jaminan akan membentuk sebuah sistem yakni sistem penjualan terhadap lelang barang jaminan tersebut. Setiap perusahaan yang kegiatan operasionalnya menjual barang maka akan dikenakan pajak sesuai dengan kebijakan Dirjen Pajak. Tentunya sistem penjualan dan bea lelang pada PT. Pegadaian (Persero) perlu dievaluasi apakah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori dan kenyataan yang terjadi di perusahaan. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Sistem Penjualan dan Bea Lelang Barang Jaminan PT. Pegadaian (Persero) Surabaya”**

## 1.2 Penjelasan Judul

### EVALUASI

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

### SISTEM

Menurut James A.Hall (2007 : 4) “sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan (subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama)”

### PENJUALAN

(Menurut Soemarso, 2009) penjualan adalah jumlah yang dibebankan kepada pembeli untuk barang dagangan yang diserahkan merupakan pendapatan perusahaan yang bersangkutan.

### BEA LELANG

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dimaksud dengan bea lelang adalah bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikenakan kepada Penjual dan/atau Pembeli atas setiap pelaksanaan lelang, yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

## LELANG BARANG JAMINAN

Lelang barang jaminan adalah penjualan atas barang jaminan sudah jatuh tempo yang terbuka untuk umum dengan penawaran harag secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

### 1.3. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem penjualan dan bea lelang lelang barang jaminan apakah sudah sesuai dengan teori dan kenyataan yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Surabaya ?

### 1.4 **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui apakah sistem penjualan dan bea lelang barang jaminan sudah sesuai dengan teori dan kenyataan yang ada pada PT. Pegadaian (Persero) Surabaya.

### 1.5 **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat:

#### 1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana atau media untuk belajar dalam menyusun laporan tugas akhir berdasarkan sistematika yang benar dan sesuai dengan pedoman.

## 2. Bagi Pembaca

Menambah wawasan serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang akuntansi khususnya tentang bagaimana cara mengevaluasi sistem akuntansi penjualan dan bea lelang terhadap lelang barang jaminan.

## 3. Bagi Perusahaan

Untuk membantu PT. Pegadaian (Persero) Surabaya memahami tentang bagaimana evaluasi sistem akuntansi penjualan dan bea lelang terhadap lelang barang jaminan.

### **1.6 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

##### a. Wawancara (Kualitatif)

Dengan melakukan wawancara atau tanya jawab kepada Manager Accounting untuk mendapatkan informasi bagaimana proses dalam melakukan penjualan lelang, jenis barang jaminan yang dilelang, dokumen yang digunakan untuk penjualan lelang barang jaminan, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penjualan lelang barang jaminan, kapan pelaksanaan penjualan lelang barang jaminan dilakukan, pajak apa yang dikenakan dalam penjualan lelang barang jaminan, kendala yang muncul dalam pelaksanaan penjualan lelang, bagaimanapun susunan struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab

dari masing-masing jabatan berdasarkan struktur organisasi yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Surabaya.

## 2. Data Sekunder

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Evaluasi Sistem Penjualan dan Bea Lelang terhadap Lelang Barang Jamian, data sekunder yang digunakan dalam pelaksanaan sistem penjualan lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) Surabaya yaitu berupa dokumen Daftar Penyerahan Barang Jamian yang akan dilelang, Laporan Daftar Penjualan Lelang, dan Berita Acara Lelang.